

DAFTAR PUSTAKA

Book:

- Dwidja Priyatno. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Martha, Aroma Elmina. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera, 2020.
- Romli Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Journal Article:

- Artidjo Alkostar, H, Ketua Kamar, and Pidana Ma-Ri. "MAKALAH KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME," 2013.
- Bahrin. "Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara Dan Upaya Penanggulangannya." *Makalah Pribadi Pengantar Ke Falsafah Sains (PPS702) Sekolah Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor* 4, no. 1 (2004): 1–15
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.
- Dr. Nasrullah, M. Ag. *Teori Dan Asas Pidana Korupsi*, 2019.
- Kuncorowati, Puji Wulandari. "Peranan Aparat Penegak Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2
- N., A. G. "Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan." *Indonesia Corruption Watch*, 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi>.
- Pardede, Lukman, and Hotmaida Simanjuntak. "Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 893–904.
- Punta Yoga Astoni. "Asas, Eksistensi, Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Advokatura Indonesia* (" 1, no. 1 (2022): 1–22.
- Siswanto, Hadi. "Pengawasan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan" *Kinabalu* 11, no. 2 (2021): 305–22.
<https://doi.org/10.46730/japs.v>.
- Srinita. "Strategy Nullify Corruption in the Education Sector and Health." *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 12, no. 02 (2016): 1891–1902.
- Sukendar, Sukendar, Fontian Munzil, and Imas Rosidawati Wr. "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 25–53.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>
- Wardani, Putu Ayu Sugiarti Kusuma, Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, and Putu Sukma Kurniawan. "Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Vol. 10, no. No. 2 (2019): Hal. 33-44.

Zainudin, Moh. "Penyelewengan Dana Bos Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik." *Jurnal Jendela Hukum* 6, no. 2 (2021): 32–38. <https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558>

Internet/Website:

- Andry Novelino. "ICW: Negara Rugi Rp1,6 Triliun Akibat Korupsi Sektor Pendidikan," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211122090819-12-724220/icw-negara-rugi-rp16-triliun-akibat-korupsi-sektor-pendidikan>.
- "Dalam Sidang Lanjutan Di Pengadilan Negeri Tipikor, JPU Mentahkan Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa Lili Suhenda," 2021. <https://www.nuansametro.co.id/2021/05/dalam-sidang-lanjutan-di-pengadilan.html>.
- Gultom. "DPP LSM GEBRAK Laporkan Dugaan Korupsi Dana BOS SMA Di Kota Cimahi." Portal Indonesia, 2021. <https://portal-indonesia.com/dpp-lsm-gebrak-laporkan-dugaan-korupsi-dana-bos-sma-di-kota-cimahi/>.
- "Kepala Sekolah Di Sukabumi Korupsi Rp519 Juta Dana Pendidikan." detik.news, 2012. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1957740/kepala-sekolah-di-sukabumi-korupsi-rp-519-juta-dana-pendidikan>.
- Syiffa Arrahmah. "JPPI Ungkap Peningkatan Kasus Korupsi Dana BOS Di Sekolah," 2022. <https://www.nu.or.id/nasional/jppi-ungkap-peningkatan-korupsi-dana-bos-di-sekolah-1Bag8>.

Regulation/International Convention:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi